

CSR disclosure – legitimacy dan perubahan retorika

Imam Wahyudi

Fakultas Pascasarjana Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

e-mail: imam@perbanas.id

ARTIKEL INFO

Article history:
Available online

Keywords:
CSR, disclosure, environment,
rhetoric, new institutional theory,
isomorphism, textual analysis

ABSTRACT

This study describes and analyzes the rhetorical changes of CSR disclosures of PT Aneka Tambang which relates to the company's environmental conducts in response to institutional pressures. Using a case study approach – the data for this study based on the sustainability reports published by the company from 2006 -2015. Interpretive textual analysis is exploited by focusing on the use of rhetoric and rhetorical arguments through researcher's subjective understanding – subjective sense making. The development of the disclosures for the period studied is contrasted with institutional pressures – domestic and international – by exploiting new institutional theory. The results show that for the period of ten years, the company's disclosures can be categorised into three periods – reducing environmental harm, awareness in preserving environment, and environmental management excellence. In order to gain social legitimacy, institutional pressures from external parties influenced the way how the company adjusted its contents of disclosures.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menjelaskan dan menganalisis perubahan retorika yang digunakan di dalam pelaporan CSR PT Aneka Tambang Tbk dengan fokus pada pelaporan manajemen lingkungan sebagai respons terhadap tuntutan dan tekanan institusi. Penelitian ini adalah sebuah studi kasus dengan menggunakan data dari laporan tahunan perusahaan – laporan keuangan dan laporan keberlanjutan usaha yang dipublikasikan selama periode 2006-2015. *Interpretive textual analysis* digunakan dengan memfokuskan pada penggunaan retorika dan argumentasi retorik di dalam laporan dengan menggunakan pemahaman subyektif peneliti. Dengan menggunakan teori institusi baru, perkembangan perubahan retorika pengungkapan selama 2006-2015 akan dianalisis dikaitkan dengan perubahan-perubahan tekanan institusi domestik dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retorika pengungkapan pelaporan selama sepuluh tahun dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu penekanan pada pengurangan kerusakan lingkungan, kesadaran dalam menjaga lingkungan, dan manajemen lingkungan *excellence*. Dalam rangka mendapatkan legitimasi sosial, ternyata tekanan institusi domestik dan internasional mempengaruhi retorika yang digunakan di dalam pelaporan.

Pendahuluan

Perusahaan di era informasi ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak melampaui batas pemangku kepentingan tradisionalnya, pemilik modal dan manajemen yang secara langsung terlibat dengan operasi bisnis. Tekanan-tekanan baru tersebut berhubungan dengan dimensi-dimensi sosial yang tidak secara langsung berhubungan dengan keputusan strategik bisnis, karena perusahaan tidak lagi dinilai berdasarkan indikator kinerja tradisional semata (keuangan), tetapi juga dengan cara perusahaan berinteraksi dengan tuntutan sosial yang begitu luas (Aguilera et al. 2007; Cochran 2007; McWilliams et al. 2006). Selama periode krisis pengungsi ke Jerman dan Swedia tahun 2015, misalnya, perusahaan-perusahaan di negara tersebut terlibat di dalam upaya membantu para pengungsi dengan dana dan penyediaan akomodasi yang mereka sebut sebagai *corporate diplomacy* untuk mengimbangi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (*public diplomacy*) (Weber dan Larsson-Olaison 2017).

Karena itulah kajian dan penelitian tentang *corporate social responsibility* (CSR) menjadi topik hangat sejak dua puluh tahun terakhir yang meliputi berbagai aspek sosial dan lingkungan yang sangat luas cakupannya (lihat misalnya Bebbington dan Gray 1993; Gray 2002; Parker 2005; Chariri dan Nugroho 2009; Purwanto 2011; Moser dan Martin 2012; Malsch 2013; Huang dan Watson 2015; Yudhiyati dan Sholihin 2016; Weber dan

Larsson-Olaison 2017). Meskipun demikian, masalah CSR sering dipahami berbeda di dalam literatur tergantung dari sudut pandang penulisnya (*instrumental* atau *mainstream view*) yang memperlakukan CSR sebagai instrumen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi seperti reputasi dan nama baik, *ethical view* yang memfokuskan pada perlakuan organisasi terhadap *stakeholders* dan *critical view* yang berusaha mengkritisi praktek-praktek CSR yang dilakukan perusahaan terutama dari sudut pandang konflik kepentingan antar kelas di dalam masyarakat (lihat misalnya: Owen 2008; Gray 2002).

Terlepas dari berbagai pandangan tentang CSR tersebut, penelitian ini menekankan pada pengaruh perusahaan terhadap lingkungan alam tempat perusahaan beroperasi dan *disclosures* yang dilakukan perusahaan untuk merespon tuntutan sosial dan institusi yang berkembang di masyarakat. Ada tiga kelompok yang mempengaruhi pelaporan sosial dan lingkungan oleh perusahaan, yaitu “*corporate characteristics, general contextual factors, dan internal contextual factors*” (Adam 2002). Penelitian ini fokus pada pengaruh *general contextual factors* terhadap retorika pelaporan lingkungan oleh perusahaan yang diteliti (Burchell et al. 1985; Guthrie dan Parker 1989). Dengan demikian, sumbangan terpenting penelitian ini adalah mengetahui pengaruh lingkungan sosial dan institusi terhadap perubahan bentuk-bentuk retorika pengungkapan lingkungan perusahaan.

Teori akuntansi sosial dan lingkungan menjelaskan bahwa organisasi menggunakan laporan sebagai alat untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasinya (Deegan 2002; 2006; Wahyudi 2010; 2012). Di Indonesia, hampir semua penelitian tentang CSR menggunakan paradigma *positivism – hypothetica-deductive* (lihat misalnya: Purwanto 2011; Djajadikerta dan Trireksani 2012; Gunawan 2015; Yudhiyati dan Sholihin 2016). Diantara sedikit peneliti yang menelaah CSR menggunakan paradigma *non-positivism* adalah Chariri dan Nugroho (2009). Dengan menggunakan pendekatan *interpretivism – semiotic analysis*, mereka menemukan bahwa retorika memiliki peranan penting dalam CSR disclosure untuk tujuan *social legitimacy*. Berbeda dengan penelitian Chariri dan Nugroho (2009) di Indonesia dan seperti penelitian Laine (2009) di Finlandia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya meyakinkan dan meningkatkan *social legitimacy* melalui perubahan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan di bidang lingkungan dan peranan tekanan institusi terhadap perubahan retorika pengungkapan tersebut.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

CSR tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan klasik tentang hubungan antara praktek-praktek manajerial dengan harapan masyarakat. Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dan *new institutional theory* (Meyer dan Rowan 1977; DiMaggio dan Powell 1983; Scott 1995), merupakan referensi teoritis yang paling sering digunakan untuk studi tentang pengaruh harapan sosial/masyarakat terhadap akuntansi dan praktek manajemen. Perkembangan sosiologi di bidang akuntansi (Hopwood 1987; Miller 1991), juga memberi jalan pada pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh masyarakat dan institusi terhadap praktek akuntansi.

Pada saat yang sama diperlukan studi tentang praktek-praktek akuntansi yang mempengaruhi harapan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang institusionalisasi praktek penilaian dan pelaporan CSR menarik untuk dipahami dan diteliti. Adams (2002) menunjukkan bahwa perubahan lingkungan sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi perubahan lingkup pengungkapan perusahaan. CSR digunakan karena fokus penelitian adalah pada pelaporan atau pengungkapan CSR oleh organisasi bisnis atau perusahaan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah teori institusi karena teori ini mampu menjelaskan proses institusionalisasi pelaporan CSR tersebut untuk memperoleh *social legitimacy*.

Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pelaporan CSR dan simbol-simbol laporan pertanggungjawaban manajemen lainnya senantiasa tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi dan bisnis di masyarakat. Salah satu faktor penting yang menentukan kelangsungan tersebut adalah adanya *social legitimacy*. Sebagaimana diketahui, manajemen di dalam suatu organisasi mungkin menjawab tekanan-tekanan institusi di luar organisasi (termasuk tuntutan untuk mematuhi pertanggungjawaban sosial) secara berbeda (Oliver 1991). Pola proses institusionalisasi tersebut berbeda dan dapat dibedakan antara *coercive pressure* (karena tekanan dan terpaksa) dan sukarela lewat *mimetic* atau *normative isomorphism* (DiMaggio dan Powell 1983).

Meskipun tidak adanya kesepakatan definisi CSR, umumnya dipahami bahwa CSR merujuk kepada “*business decision making linked to ethical values, compliance with legal requirements, respect for people, involvement in social activities, communities, and the environment*” (Hasan dan Harahap 2010). Pertanggungjawaban sosial menempatkan perilaku perusahaan sesuai dengan norma, nilai dan harapan sosial atau masyarakat. CSR dengan demikian berhubungan dengan pemahaman dan pengelolaan kinerja sosial perusahaan yang meliputi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap masyarakat.

Demikian juga dengan pengungkapan atau pelaporan CSR yang sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang cakupan dan definisinya. Satu definisi yang sering digunakan adalah “*the process of communicating the social and environmental effects of organisations’ economic actions to particular interest groups within society and to society at large*” (Gray et al. 1987). Hal senada disampaikan Perks (1993) yang mendefinisikan pelaporan CSR sebagai “*disclosure of those costs and benefits that may or may not be quantifiable in money terms arising from economic activities and substantially borne by the community at large or other stakeholders*”. Ini mengindikasikan bahwa pelaporan CSR adalah cara manajemen perusahaan berinteraksi dengan masyarakat luas untuk mempengaruhi persepsi pihak luar tentang organisasi mereka (Deegan 2002).

Meskipun berbagai macam label diberikan kepada pelaporan CSR seperti *social accounting* (misal Labelle et al. 2006), *social/environmental disclosure* (misal Deegan 2002), *sustainability disclosure* (misal Stanwick dan Stanwick 2006), *social auditing* (misal Gray 2000), *social review* (misal O’Dwyer dan Owen 2005), *sustainability reporting* (misal Ballou et al. 2006), pelaporan CSR merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi di luar tugas konvensionalnya melaporkan kinerja keuangannya kepada pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu pelaporan CSR lebih sering dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk mendapatkan *social legitimacy* (misalnya reputasi baik di masyarakat karena banyak melakukan kegiatan) kegiatan sosial dan perbaikan lingkungan hidup.

Dalam perspektif *social legitimacy* itulah maka teori institusi menjadi relevan untuk digunakan di dalam penelitian ini. Teori institusi menyatakan bahwa organisasi cenderung mengadopsi struktur (organisasi), sistem dan prosedur – yang dianggap sukses atau baku untuk mendapatkan pengakuan sosial. Oleh karena itu berbagai penelitian terdahulu tentang CSR *disclosure* dan *social legitimacy* banyak yang menggunakan teori institusi sebagai alat analisisnya (lihat misalnya: Milne dan Patten 2002; Laine 2009; Tilling dan Tilt 2010; Castello dan Lozano 2011; Hrasky 2012; Abdullah dan Aziz 2013; Rodrigue 2014; Bommel 2014).

Teori Institusi Baru (*New Institutional Theory*)

Burger dan Luckman (1967) menjadi tonggak awal *new institutional theory* dengan pernyataannya bahwa *the world or reality is socially constructed*. Teori institusi baru berkembang sejak pertengahan tahun 1970 di hampir semua cabang ilmu sosial. Meyer dan Rowan (1977) serta Zucker (1977) adalah yang memperkenalkan argumen-argumen institusi ke dalam sosiologi organisasi. Meyer dan Rowan (1977) meyakini bahwa organisasi adalah hasil dari rasionalisasi ketentuan-ketentuan budaya yang berfungsi sebagai mitos dan diadopsi dengan mengorbankan ukuran-ukuran efisiensi organisasi. Mereka melihat organisasi dari perspektif makro dengan menekankan pada dampak perubahan-perubahan lingkungan institusi yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk organisasi.

DiMaggio dan Powell (1983) mengembangkan dan memperjelas perspektif ini dengan mengidentifikasi tiga macam mekanisme institusionalisasi, yaitu *coercive*, *mimetic* dan *normative*, proses dimana norma-norma institusi mempengaruhi lingkungan organisasi. Mereka menekankan kesamaan struktur (*isomorphism*) sebagai akibat dari proses yang bersifat kompetitif dan institusional.

Organisasi berada dan beraktifitas di lingkungan sosial. Sedangkan budaya dan perilaku sosial mempengaruhi nilai-nilai, norma dan aturan yang ada. Pada akhirnya nilai-nilai, norma dan aturan tersebut menentukan *legitimacy* suatu organisasi yang bisa memenuhi hal tersebut. Sistem sosial itu menyediakan sumber *legitimacy* suatu organisasi dalam bentuk penerimaan oleh masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitasnya (Fogarty 1992). Dengan demikian, struktur di dalam organisasi mencerminkan “*rationalized institutional rules*” (Meyer dan Rowan 1977), “*symbolic displays of appropriate conformity*” (Scott 1987), dan “*shared knowledge and belief systems*” (Scott 1995).

Coercive isomorphism terjadi karena tekanan dari organisasi lain untuk menyesuaikan dengan harapan dan budaya masyarakat yang lebih luas (DiMaggio dan Powell 1983). Harapan dan budaya tersebut tercermin pada lingkungan institusi tempat suatu organisasi dituntut menyesuaikan diri terhadap harapan masyarakat. Tekanan tersebut bisa dalam bentuk paksaan, persuasi, atau ajakan. Termasuk dalam kategori tekanan *coercive* ini adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ketergantungan sumber daya ekonomi serta *legitimacy* oleh negara (Lawrence et al. 2001).

Mimetic isomorphism adalah proses suatu organisasi melakukan peniruan atau *mengcopy* organisasi lain di bidangnya yang dianggap sukses dan *legitimate*. Ketidakpastian adalah salah satu pendorong yang kuat terjadinya proses imitasi atau peniruan tersebut (DiMaggio dan Powell 1983). Dengan demikian, proses *mimetic* tersebut adalah merupakan tindakan terbaik dalam menjawab ketidakpastian masa depan organisasi (Carpenter dan Feroz 2001). Dalam ungkapan DiMaggio dan Powell (1983), “*(t)he ubiquity of certain kinds of structural arrangements can more likely be credited to the universality of mimetic processes than to any concrete evidence that the adopted models enhance efficiency*”. Perilaku ini mencerminkan efektivitas daripada efisiensi organisasi,

sehingga Mouritsen (1994) mengatakan perilaku ini sebagai “*symbolic behaviour (whereby) individuals and groups are frequently hypocritical, reciting sacred myths without believing them and while violating their implication*”.

Profesionalisasi dapat mempromosikan *procedural legitimacy* untuk menentukan lingkungan kerja, pengendalian keluaran, serta menciptakan dasar otonomi pekerjaan (DiMaggio dan Powell 1983; Scott 1987). Tekanan profesionalisasi berasal dari dua sumber, yaitu pendidikan formal untuk mencetak spesialis dan jaringan kerja profesional yang mempromosikan model dan standar pekerjaan (DiMaggio dan Powell 1983). Keduanya merupakan sumber penting *normative isomorphism* sebagai bentuk mobilisasi kolektif untuk memperoleh lisensi dan bertindak dari pihak yang memiliki “*collective authority over what is acceptable theory*” (Meyer dan Scott 1992). Mitos yang diciptakan oleh asosiasi profesi cenderung memiliki *legitimacy* yang kuat karena keyakinan bahwa asosiasi profesional adalah rasional (Meyer dan Rowan 1977), sehingga individu atau organisasi merasa terhormat karena berada di dalam sebuah afiliasi profesional (Lawrence et al. 2001).

Decoupling dalam Teori Institusi

Teori institusi sangat menekankan pentingnya peranan simbol agar suatu organisasi memperoleh *social legitimacy* (Scott 1987). Hal itu sesuai dengan pernyataan Fogarty (1992) bahwa “*the way organizations are organized and operate, to the extent they are visible to the public, are purposely designed to accommodate social expectations*”. Suatu organisasi mengadopsi struktur formal – organisasi, sistem dan prosedur termasuk sistem informasi akuntansi – yang dipandang memadai dan diterima umum dalam rangka memenuhi harapan masyarakat atau lingkungan sosialnya.

Meskipun demikian, praktek yang dilakukan oleh organisasi sering berbeda dengan struktur formal yang diadopsi yang seharusnya dilakukan. Tuntutan efisiensi dan efektifitas membuat praktek manajemen di dalam menjalankan organisasi melanggar atau tidak sesuai dengan struktur formal yang ada. Pada saat yang sama, organisasi dituntut untuk mengikuti struktur dan ketentuan formal tersebut (ketentuan prosedural) dalam rangka mempertahankan *legitimacy*-nya. Struktur formal berubah menjadi simbol rasionalisasi dan alat *legitimacy*. Dalam situasi seperti ini, *decoupling* (keadaan ketika organisasi mempertahankan struktur formalnya tanpa harus menggunakannya/menerapkannya di dalam praktek) memegang peranan yang sangat penting (Meyer dan Rowan 1977).

Metoda Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *interpretivism*. *Interpretivism* adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggunakan ontologi relativisme, epistemologi subyektif dan transaksional serta metodologi dialektika dan hermenetik (Guba dan Lincoln 1998). Dengan pendekatan ini, penelitian ini meyakini bahwa fenomena sosial – laporan keuangan dan *sustainability report* yang menjadi subyek penelitian ini – adalah relatif dan subyektif sebagai antitesa dari pandangan yang meyakini bahwa informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah obyektif dan rasional.

Dalam perspektif ini, realitas sosial dipahami sebagai sebuah makna yang terbentuk (dibuat dan dimaknai) oleh komunitas lingkungannya. Fokus penelitian adalah untuk memahami (*verstehen*) realitas tersebut berdasarkan interpretasi “subyektif” peneliti dan yang diteliti sesuai dengan pengalaman mereka. Secara umum, *interpreter* dipahami sebagai “*one who is engaged in a critical analysis or explanation of text and/or human action by using a method that is called hermeneutic circles*” (Schwandt 2000).

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa *annual report* yang terdiri atas laporan keuangan serta *sustainability report* dalam bentuk narasi, gambar dan laporan lainnya yang berkaitan dengan CSR sebuah perusahaan – studi kasus tunggal perusahaan. Perusahaan tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk (Persero) sebagai sebuah perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara yang bergerak di berbagai jenis usaha pertambangan. *Annual report* tersebut diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange* dan laman perusahaan selama sepuluh tahun dari tahun 2006 sampai 2015. Perusahaan tersebut dipilih sebagai studi kasus karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Perusahaan pertambangan adalah jenis perusahaan yang banyak merusak lingkungan karena sifatnya yang eksploitatif terhadap alam.
- Perusahaan ini termasuk kedalam skala usaha yang besar karena perusahaan skala inilah yang selalu mendapat perhatian dan sorotan masyarakat serta media massa dan senantiasa dikaitkan dengan kerusakan lingkungan.
- Perusahaan tersebut sudah melaksanakan kegiatan dan pelaporan CSR secara rutin semenjak tahun 2005.

Analisis data difokuskan pada *rhetoric* dan *rhetorical arguments* yang dilakukan perusahaan untuk menjawab tuntutan perubahan sosial dan institusi. Pendekatan analisis ini dikenal sebagai *interpretive textual analysis* (Laine 2009; Tregidga dan Milne 2006) yang dilakukan lewat proses pemahaman subyektif – *subjective sense making* – dengan membaca laporan berulang-ulang dan upaya untuk mensistematisasikan temuan ke dalam pemahaman yang logis dan rasional. Metode analisis ini termasuk ke dalam kelompok *discourse analysis* (Jorgensen dan Phillips 2002).

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan – laporan keuangan dan *sustainability report* sebagai data penelitian karena lewat laporan tersebut perusahaan mencoba mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan dan masyarakat luas tentang posisi perusahaan di dalam persoalan-persoalan lingkungan. Laporan tahunan adalah merupakan media komunikasi perusahaan yang tentunya dibuat dengan menggunakan pilihan strategi retorika dan argumentasi retoriknya. Retorika dalam hal ini dipahami seperti yang digunakan oleh Laine (2009) dengan mengutip dari berbagai sumber sebagai “*conscious choices of expressions, metaphors, symbols and language, through which the organisation aims at (re)framing and (re)presenting itself as a certain kind of actor ... text as rhetoric means designed to do something within a community*”.

Interpretasi data dilakukan dengan membaca dan menelaah laporan tentang pengungkapan lingkungan (*environmental disclosures*). Semua kalimat yang mengungkapkan tentang lingkungan termasuk informasi keuangan diberi perhatian khusus. Semua fakta yang sesungguhnya terjadi dalam upaya mempertahankan dan melindungi lingkungan dalam bentuk pemulihan kondisi lingkungan setelah selesai penambangan/lokasi penambangan dinyatakan ditutup didiskusikan dengan membuat urutan waktu kejadiannya termasuk perkembangan pengungkapan yang terjadi. Dengan demikian, urutan waktu tersebut memuat pernyataan tentang tindakan yang dilakukan perusahaan dan perubahan retorika yang dilakukan untuk melaporkan tindakan tersebut.

PT Aneka Tambang Tbk mulai membuat dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berisi informasi tentang kinerja kegiatan tentang ekonomi, lingkungan hidup dan sosial sejak tahun 2005. Akan tetapi penelitian ini mengambil data penelitian sejak tahun 2006 sampai 2015 karena tidak menemukan data tahun 2005 di laman perusahaan. Seperti penelitian Laine (2009), interpretasi data dilakukan secara berulang (*iterative process*) dengan perhatian khusus pada persamaan dan perbedaan antar periode pelaporan yang meliputi tema-tema dominan yang muncul dan hilang antar periode, perubahan-perubahan dalam ekspresi sampai dengan metafora atau simbol yang digunakan di dalam pelaporan.

Hasil dan Pembahasan

Menarik untuk mengawali pembahasan dengan mengutip pernyataan Labour Education (2003:IV) sebagai berikut:

“Democracy remains the best guarantor that social and environmental issues will be addressed in a progressive manner. And besides legislation, the voluntary initiatives most likely to succeed are those that rely on the strengths of democracy by engaging other stakeholders, including through tripartite initiatives, use of non-binding instruments and various forms of partnership and agreements.”

Akan tetapi, seperti yang terjadi di negara berkembang pada umumnya, peranan *civil society* (bagian dari pemangku kepentingan) sebagai kelompok penekan di Indonesia belum begitu kuat dan berpengaruh.

Peran tersebut kemudian lebih banyak diambil oleh Negara melalui pemerintah yang berfungsi sebagai pengatur yang memiliki kewenangan memberikan sanksi dan hukuman. Melalui berbagai produk perundangan dan perangkat di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, pemerintah mengambil peran sebagai pengatur masalah sosial dan lingkungan yang melibatkan perusahaan yang di dalam praktek perusahaan dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* – termasuk di dalamnya adalah tanggungjawab lingkungan korporasi.

Corporate Environmental Disclosure PT Aneka Tambang Tbk

Dalam masalah pertanggungjawaban lingkungan perusahaan, pemerintah telah memiliki perangkat aturan yang cukup lengkap untuk perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral, diantaranya adalah:

1. Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan
2. Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
3. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang.

Sebagai sebuah perusahaan pertambangan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Negara, PT Aneka Tambang Tbk memiliki kewajiban untuk senantiasa mentaati aturan perundangan yang berlaku.

Secara garis besar retorika yang digunakan di dalam pelaporan tahunan PT Aneka Tambang Tbk dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode pelaporan berdasarkan argumen retorika yang digunakan di dalam pengelolaan lingkungan. Tabel 1 merupakan hasil penelaahan peneliti yang menunjukkan berbagai pendekatan retorik yang digunakan PT Aneka Tambang dari laporan tahunan yang dipublikasikan.

Tabel 1. Pendekatan retorik yang digunakan PT Aneka Tambang

	2006 -2007 Periode Upaya Pengurangan Kerusakan Lingkungan	2008 – 2012 Periode Kesadaran Pelestarian Lingkungan	2013 – 2015 Periode Pengelolaan Lingkungan <i>Excellence</i>
Bentuk retorika	Reaksi dan pengakuan atas masalah lingkungan yang timbul	Pro-aktif dalam manajemen lingkungan	Eksplorasi keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan
Isi Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan prestasi dalam pengendalian emisi dan menjaga lingkungan • Reklamasi • Peningkatan realisasi biaya manajemen lingkungan dari Rp 22 milyar di tahun 2005 menjadi Rp 43 milyar di tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Direktorat Umum dan CSR • Satuan Kerja CSR disetarakan dengan Senior Manajer • Peningkatan realisasi pengeluaran biaya lingkungan • Jaminan biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dicadangkan sejak awal rencana pembukaan tambang • Penutupan tambang dan reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneruskan proses reklamasi dan penutupan tambang • Penyusunan <i>ANTAM Green Standard</i> berisi SOP yang harus dipenuhi terkait lingkungan • Peningkatan peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup
Orientasi	Domestik – tuntutan perundangan dan peraturan yang berlaku	Domestik – tuntutan perundangan dan peraturan yang berlaku dan internasional untuk memperoleh ISO-14001	Kepentingan domestik dan internasional dalam rangka <i>sustainable growth</i>
Sumber tekanan	<i>Coercive</i> dan <i>mimetic isomorphism</i>	<i>Coercive</i> dan <i>mimetic isomorphism</i>	<i>Mimetic Isomorphism</i>

Sumber: Laporan Tahunan PT. Aneka Tambang

Periode 2006 – 2007

Periode tahun 2006 sampai tahun 2007 ditandai dengan retorika tentang keberhasilan perusahaan di dalam menjaga lingkungan yang sehat melalui keberhasilannya di dalam mengendalikan ambang emisi dibawah standar baku mutu. Manajemen ingin menunjukkan bahwa perusahaan bisa beroperasi secara efisien dan *financially sound* dengan tetap menjaga keamanan lingkungan.

Hal itu terlihat seperti penekanan yang dibuat di dalam laporan keberlanjutan tahun 2006 berikut ini: “...kami memaparkan gambaran umum tentang hasil analisis yang dilakukan oleh laboratorium independen yang telah terakreditasi oleh pemerintah Indonesia, dan melakukan perbandingan dengan standar-standar yang berlaku. Tahun ini, kualitas pembuangan kami sangat baik dan kami bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengendalian ini demi melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar. Secara rata-rata, kami berada jauh di bawah standar, namun bila kami memang melampaui standar-standar tersebut, hal itu langsung dilaporkan kepada kantor pusat dan langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk mengurangi tingkat pencemaran sampai ke level di bawah standar. Untuk tahun yang akan datang, kami berupaya menerapkan suatu rencana pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan operasi kami agar dapat memantau dan segera bertindak dalam keadaan darurat” (halaman 33-34).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang mengakui bahwa keberadaan dan operasinya memang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Terkesan dari kutipan di atas bahwa perusahaan melakukan hal itu bukan karena tekanan institusi dalam bentuk *coercive* maupun *mimetic*. Akan tetapi apabila merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebagai

sebuah perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki negara melalui pemerintah maka pengungkapan lingkungan tersebut lebih karena *coercive isomorphism*.

Bukti bahwa tekanan pemerintah menjadi dasar utama di dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasi penambangan oleh perusahaan dapat dilihat di pernyataan manajemen di dalam laporan keberkelanjutan tahun 2006 sebagai berikut:

“Antam merupakan perusahaan yang dievaluasi dan dinilai tingkat kinerja lingkungannya melalui program PROPER ((Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan di bidang Lingkungan Hidup) yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Lima tingkat kinerja mulai dari Hitam, Merah, Biru, Hijau dan Emas. Tingkat Biru menandakan bahwa suatu perusahaan telah menaati peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.” (Halaman 26)

Laporan manajemen dalam pengelolaan lingkungan pada periode ini nampaknya lebih ditujukan untuk meyakinkan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, bahwa perusahaan berbuat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan. Hal itu dapat diketahui dari penekanan dalam retorika pelaporan pada tahun 2006 pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Filosofi perusahaan dalam pengelolaan lahan pertambangan
2. Pelestarian keanekaragaman hayati di lahan tambang yang dikelola
3. Penggunaan kembali material dari penambangan untuk pembuatan jalan dan dermaga serta bata untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat
4. Pengelolaan limbah berbahaya (limbah B3) agar tidak merugikan masyarakat

Keinginan kuat untuk mendapatkan pengakuan dari institusi pemeringkat internasional bahwa perusahaan menjaga keberlangsungan lingkungan juga nampaknya menjadi faktor lain terjadinya perubahan orientasi di dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perspektif ini, kemauan untuk meniru praktek-praktek yang sudah mapan dalam pengelolaan lingkungan menjadi dorongan untuk melakukan pelaporan tersebut. Dorongan untuk meniru praktek yang dianggap sudah diterima umum ini adalah merupakan bentuk *mimetic isomorphism*.

Periode 2008 – 2012

Periode ini ditandai dengan pembentukan direktorat baru dengan nama Direktorat Umum dan CSR pada 26 Juni 2008. Manajemen dan semua permasalahan lingkungan diletakkan di dalam direktorat ini. Direktorat ini berada di bawah pimpinan seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pembentukan direktorat ini menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan di mata perusahaan meskipun pada Oktober 2007 sudah dibentuk sebuah Satuan Kerja *Environment and Mine Closure*.

Kutipan dari laporan keberkelanjutan tahun 2008 berikut ini bisa menjelaskan alasan dibentuknya direktorat baru tersebut:

“Adanya satuan kerja lingkungan dan penutupan tambang (*Environment and Mine Closure*) yang telah dibentuk pada bulan Oktober 2007 menunjukkan kinerja yang baik. Perubahan nama ‘mine closure’ dari yang sebelumnya ‘post mining’ menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dan fokus setelah adanya Direksi Umum & CSR yang baru. Arti ‘mine closure’ menunjukkan proses yang lebih fokus pada persiapan dan pelaksanaan penutupan tambang dan simultan dengan persiapan periode pasca tambang yang lebih terencana. Sedangkan bagian Post Mining tetap dipertahankan dan kini berada di bawah Direksi Umum & CSR yang menunjukkan komitmen yang lebih tinggi untuk keberhasilan pasca tambang.” (Halaman 40)

Apabila dikaitkan dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18 /2008 pada tanggal 29 Mei 2008, ada indikasi sangat kuat bahwa pembentukan direktorat baru tersebut sebagai akibat *coercive pressure* dari pemegang saham – pemerintah. Hal itu juga ditunjukkan dengan dilakukannya pencadangan/penyisihan biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup yang lebih dikenal sebagai “biaya jaminan reklamasi” mulai tahun 2008 dilakukan sejak awal rencana pembukaan tambang sesuai amanat Permen tersebut. Sebelum adanya Permen tersebut, PT Aneka Tambang melakukan penyisihan “biaya jaminan reklamasi” tersebut lima tahun menjelang penutupan tambang.

Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya biaya pengelolaan lingkungan secara terus-menerus karena peningkatan biaya penutupan tambang dan reklamasi, vegetasi, pengendalian erosi dan penanganan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa retorika yang digunakan di dalam pelaporan di dukung oleh kenyataan di lapangan.

Peningkatan biaya pengelolaan lingkungan tersebut juga sepertinya berkaitan erat dengan diperolehnya ISO-14001 untuk tiga unit bisnis perusahaan yaitu Tambang Timah di Pongkor, Tambang Nikel di Pomala dan unit bisnis Pengelolaan & Pemurnian Logam Mulia pada tahun 2008. Perusahaan telah mendapatkan pengakuan internasional di dalam sistem manajemen pengelolaan lingkungannya. Retorika dalam periode ini dengan demikian ditujukan untuk pembaca yang lebih luas mengingat perusahaan juga terdaftar di Bursa Efek Australia (ASX). Alasan ini memperkuat dugaan bahwa disamping tuntutan pemerintah yang bersifat *coercive*, retorika dalam pelaporan pengelolaan lingkungan pada periode ini juga didorong oleh keinginan manajemen untuk meniru praktek-praktek yang sudah diterima umum di tingkat internasional – *mimetic isomorphism*.

Periode 2013 - 2015

Periode ini menandai perubahan retorika orientasi perusahaan dari manajemen lingkungan proaktif menjadi manajemen lingkungan yang berorientasi jangka panjang yaitu keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan (*sustainable business*). Hal itu diperlihatkan oleh adanya Surat Keputusan Direksi tentang pengesahan **ANTAM Green Standard** pada 3 Januari 2013. Standar ini berisi sebelas standar operasi yang harus dipenuhi terkait dengan lingkungan. Keputusan tersebut tampaknya timbul dan didorong oleh prestasi yang diperoleh dari Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) serta keinginan untuk mempertahankan pengakuan internasional, yaitu ISO-14001. Dua macam motivasi tersebut nampaknya cukup untuk mengelompokkan proses institusionalisasi pengelolaan lingkungan lingkungan tersebut akibat dari *mimetic pressure* – keinginan kuat untuk mengadopsi praktek-praktek manajemen lingkungan yang sudah menjadi *acceptable practices* di tingkat internasional.

Laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2013, misalnya, menekankan pada retorika tentang upaya perusahaan untuk melakukan eksplorasi tambang yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai berikut:

1. Penggunaan dan pengelolaan material yang sebagian berasal dari proses daur ulang limbah.
2. Penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi
3. Pemanfaatan kembali air bekas pakai di dalam proses produksi
4. Pengendalian emisi lainnya serta instalasi air limbah yang dipasang dan digunakan di setiap unit bisnis sehingga kualitas air yang dibuang telah memenuhi baku mutu yang ditentukan pemerintah. Hal itu ditekankan di dalam laporan keberlanjutan tahun 2013 sebagai berikut:

“Dari hasil pemantauan dan pengukuran dengan melibatkan pihak independen dan laboratorium terakreditasi, dipastikan kualitas olahan air limbah yang dialirkan kembali ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, selama tahun 2013, ANTAM tidak pernah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat maupun pihak berwenang terkait gangguan keanekaragaman hayati dan habitat di dalam badan air.” (Halaman 49)

5. Pengurangan emisi gas rumah kaca dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 1,43 juta pohon yang terdiri atas 261.320 pohon di lahan bekas tambang dan 1.169.483 pohon di lahan luar tambang. Penanaman pohon ini juga untuk menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

Laporan keberlanjutan tahun 2015 memperkuat retorika itu dengan menggunakan gambar diagram yang sangat mencolok dan angka bahwa *community satisfaction index* di lokasi tambang-tambang milik perusahaan sangat tinggi yaitu 78,22%. Program-program lingkungan dalam bentuk kemitraan, pengembangan masyarakat dan bina lingkungan dan reklamasi, mengiringi lima tindakan di paragraf sebelumnya yang telah dilakukan perusahaan terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keberadaan operasi perusahaan di lingkungan mereka.

Simpulan

Perubahan dalam retorika *sustainability reports* (laporan berkelanjutan) PT Aneka Tambang selama periode penelitian dari 2006-2015 terjadi untuk memenuhi tuntutan dan harapan lingkungan sosialnya – institusi dan masyarakat dan keinginan manajemen. Periode awal retorika pengungkapan berisi upaya perusahaan mengurangi kerusakan lingkungan yang lebih bersifat reaktif untuk memenuhi tuntutan perundangan dan peraturan yang berlaku – *coercive pressures*. Retorika pelaporan periode ke dua lebih menonjolkan tindakan manajemen yang proaktif dalam menyelenggarakan program pemeliharaan lingkungan – *mimetic pressures* lebih dominan dibanding *coercive pressures*. Sedangkan periode ke tiga, jargon retorika lebih banyak menonjolkan capaian perusahaan dalam eksplorasi keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan – *mimetic* dan *normative pressures* menjadi faktor dominan untuk mempertahankan *legitimacy socialnya*.

Agak berbeda dengan penelitian Laine (2009), penelitian ini menemukan fakta bahwa penilaian yang positif tentang pengelolaan lingkungan perusahaan juga diperoleh dari berbagai lembaga yang independen dan komunitas di daerah operasi tambang. Hal itu mengindikasikan bahwa mungkin retorika yang dilakukan dan disampaikan di dalam laporan berkelanjutan perusahaan lebih bersifat *real* daripada *symbolic*.

Decoupling (Meyer dan Rowan 1977), antara kenyataan di lapangan dengan retorika pengungkapan di dalam pelaporan kemungkinan juga terjadi. Meskipun demikian, sebagai BUMN, manajemen nampaknya cenderung menerapkan strategi *acquiescence* – mentaati aturan yang berlaku dan menerima norma-norma yang ada serta *compromise* – menyeimbangkan beragam harapan dari berbagai kelompok kepentingan (Oliver 1991), sehingga memperkecil peluang terjadinya kesenjangan antara retorika dengan kenyataan di lapangan. Hal itu terkait dengan kepentingan pemegang saham mayoritas (pemerintah mewakili Negara) dan keinginan manajemen untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi bisnis yang ramah lingkungan di mata masyarakat dan investor internasional.

Sebagai sebuah studi kasus dengan pendekatan penelitian interpretif, temuan penelitian bukan dimaksudkan untuk digeneralisasi. Temuan penelitian ini merupakan respon yang dilakukan manajemen didalam menyajikan laporan pertanggungjawaban lingkungan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan institusi domestik serta internasional sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, temuan penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis semata-mata didasarkan pada pelaporan formal yang ada yang kemungkinan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Penelitian lebih mendalam dengan menggunakan wawancara dan *participant observation* mungkin akan menghasilkan temuan yang lebih mencerminkan kenyataan di lapangan.

Daftar Referensi

- Abdullah, Z., dan Y. A. Aziz. 2013. Institutionalizing corporate social responsibility: effects on corporate reputation, culture, and legitimacy in Malaysia. *Social Responsibility Journal* 9 (3): 344-361.
- Adams, C. A. 2002. Internal organisational factors influencing corporate social and ethical reporting: beyond current theorising. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15 (22): 23-50.
- Aguilera, R. V., D. E. Rupp, C. A. Williams, dan J. Ganapathi. 2007. Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations. *Academy of Management Review* 32 (3): 836-63.
- Ballou, B., D. L. Hetzer, dan C. E. Landes. 2006. The future of corporate sustainability reporting. *Journal of Accountancy* 202 (6): 65-74.
- Bebbington, J., dan R. Gray. 1993. Corporate accountability and the physical environment: social responsibility and accounting beyond profit. *Business Strategy and the Environment* 2 (1): 1-11.
- Bommel, K. 2014. Towards a legitimate compromise? An exploration of integrated reporting in the Netherlands. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 27 (7): 1157-1189.
- Burchell, S., C. Clubb, dan A.G. Hopwood. 1985. Accounting in its social context: towards a history of value added in the United Kingdom. *Accounting, Organisations and Society* 10 (4): 381-413.
- Castello, I., dan J. M. Lozano. 2011. Searching for new forms of legitimacy through corporate responsibility rhetoric. *Journal of Business Ethics* 100: 11-29
- Chariri, A., dan F. A. Nugroho. 2009. Retorika dalam pelaporan corporate social responsibility: Analisis semiotic atas sustainability PT Aneka tambang Tbk. *Simposium nasional Akuntansi XII*. 4-6 November.
- Cochran, P. L. 2007. The evolution of corporate social responsibility. *Business Horizons* 50 (6): 449-454.
- Deegan, C. 2006. *Financial Accounting Theory*. McGraw Hill Australia.
- _____. 2002. Introduction. The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15 (3): 282-311.
- DiMaggio, P., dan W. Powell. 1983. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review* 48: 147-160.
- Djadjdikerta, H. G., dan T. Trireksani. 2012. Corporate social and environmental disclosure by Indonesian listed companies on their corporate web sites. *Journal of Applied Accounting Research* 13 (1): 21-36.

- Fogarty, T. J. 1992. Financial accounting standard setting as an institutionalized action field: constraints, opportunities and dilemmas. *Journal of Accounting and Public Policy* 11: 331-335.
- Gray, R. 2002. Of messiness, systems and sustainability: towards a more social and environmental finance and accounting. *British Accounting Review* 34 (4): 357-386.
- _____. 2000. Current developments and trends in social and environmental auditing, reporting and attestation: a review and comment. *International Journal of Auditing* 4 (3): 247-268.
- Gray, R., D. Owen, dan K. Maunders. 1987. *Corporate social reporting*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Guba, E. G., dan Y. S. Lincoln. 1998. Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Editor). *The landscape of qualitative research - theories and issues*. (Hal: 195-220). Thousand Oaks CA: Sage Publication.
- Gunawan, J. 2015. Corporate social disclosures in Indonesia: stakeholders' influence and motivation. *Social Responsibility Journal* 11 (3): 535-552.
- Guthrie, J., dan L. D. Parker. 1989. Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory. *Accounting & Business Research* 19 (76): 343-352.
- Hasan, A., dan S. S. Harahap. 2010. Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (3): 203-227.
- Hopwood, A. G. 1987. The archaeology of accounting systems. *Accounting, Organizations and Society* 12 (3): 207-234.
- Hrasky, S. 2012. Carbon footprints and legitimation strategies: symbolism or action? *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 25 (1): 174-198.
- Huang, X. B., dan L. Watson. 2015. Corporate social responsibility research in accounting. *Journal of Accounting Literature* 34 (1): 1-16.
- Jorgensen, M. dan L. Phillips. 2002. *Discourse analysis as theory and methods*. London: Sage publication
- Labelle, R., A. Schatt, dan B. Sinclair-Desgagne. 2006. Corporate sustainability reporting, in J. Allouche (Editor). *Corporate social responsibility. Volume 1: Concepts, Accountability and Reporting*. London: Palgrave Macmillan.
- Labour Education. 2003. Editorial. In *Corporate social responsibility: Myth or Reality?*. 1 (130).
- Laine, M.. 2009. Ensuring legitimacy through rhetorical changes? a longitudinal interpretation of the environmental disclosures of a leading Finnish chemical company. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 22 (7): 1029-1054.
- Lawrence, T. B., M. I. Winn, dan P. D. Jennings. 2001. The temporal dynamics of institutionalization. *Academy of Management Review* 26 (4): 624-644.
- Malsch, B. 2013. Politicizing the expertise of the accounting industry in the realm of corporate social responsibility. *Accounting, Organization and Society* 38 (2): 149-168.
- McWilliams, A., D. S. Siegel, dan P. M. Wright. 2006. Corporate social responsibility: strategic implications. *Journal of Management Studies* 43 (1): 1-18.
- Meyer, J. W., dan B. Rowan. 1977. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology* 83 (2): 340-63.
- Meyer, J. W., dan R. Scott. 1992. Centralization and legitimacy problems of local government. In J.W. Meyer and W.R. Scott (Editor). *Organizational Environments: Ritual and Rationality*. (Hal: 199-216). Beverly Hill: Sage Publications.
- Miller, P. 1991. Accounting innovation beyond the enterprise: problematizing investment decisions and programming economic growth in the UK in the 1960's. *Accounting, Organizations and Society* 16 (8): 733-792.

- Milne, M. J., dan Patten, D. M. 2002. Securing organizational legitimacy – an experimental decision case examining the impact of environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15 (3): 372-405.
- Moser, D. V., dan P. R. Martin. 2012. A Broader perspective on corporate social responsibility research in accounting. *The Accounting Review* 87 (3): 797-806
- Mouritsen, J. 1994. Rationality, institutions and decision making: reflections on march and olsen's rediscovering institutions. *Accounting, Organizations and Society* 19 (2): 193-211.
- O'Dwyer, B. dan D. L. Owen. 2005. Assurance statement practice in environmental, social and sustainability reporting: a critical evaluation. *The British Accounting Review* 37 (2): 205-229.
- Oliver, C. 1991. Strategic responses to institutional processes. *Academy of Management Review* 16 (1): 145-179.
- Owen, D. 2008. Chronicles of wasted time? A personal reflection on the current state of, and future prospects for social and environmental accounting research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 21 (2): 240-267.
- Parker, L. D. 2005. Social and environmental accountability research. A view from the commentary box. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 18 (6): 842-60.
- Perks, R. W. 1993. *Accounting & society*. London: Chapman & Hall.
- Purwanto, A. 2011. Pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, terhadap corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8 (1): 12-29.
- Rodrigue, M. 2014. Contrasting realities: corporate environmental disclosure and stakeholder-released information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 27 (1): 119-149.
- Scott, W. R. 1995. *The institutional construction of organizations*. London: Sage Publications.
- _____. 1987. The adolescence of institutional theory. *Administrative Science Quarterly* 32 (December): 493-511
- Schwandt, T. 2000. Three epistemological stances for qualitative inquiry interpretivism, hermeneutics, and social constructionism. In N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (Editor). *Handbook of qualitative research*. (Hal: 189-213). Thousand Oaks: Sage Publication.
- Stanwick, P. A., dan S. D. Stanwick. 2006. Environmental and sustainability disclosures: a global perspective on financial performance. in J. Allouche (Editor). *Corporate social responsibility. Volume 2: Performances and Stakeholders*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Tilling, M. V., dan C. A. Tilt. 2010. The edge of legitimacy – voluntary social and environmental reporting in Rothmans' 1956-1999 annual reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 23 (1): 55-81.
- Tregidga, H., dan M. J. Milne. 2006. From sustainable management to sustainable development: a longitudinal analysis of a leading New Zealand environmental reporter. *Business Strategy and the Environment* 15 (4): 219-241.
- Wahyudi, I. 2012. The effect of corruption on accounting information: an institutional theory perspectives. *24th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues*. Hawaii. October 21-23.
- _____. 2010. A political display and symbolic reasoning of budgeting: organizational control systems in an Indonesian higher education institution. *The Indonesian Journal of Accounting Research* 13 (1): 79-100.
- Weber, F., dan U. Larsson-Olaison. 2017. Corporate social responsibility accounting for arising issues. *Journal of Communication Management* 21 (4): 370-383.
- Yudhiyati, R., dan M. Sholihin. 2016. Apakah pengungkapan sosial memediasi hubungan antara variabel kontekstual dan kinerja keuangan? bukti empiris pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20 (2): 85-98.